

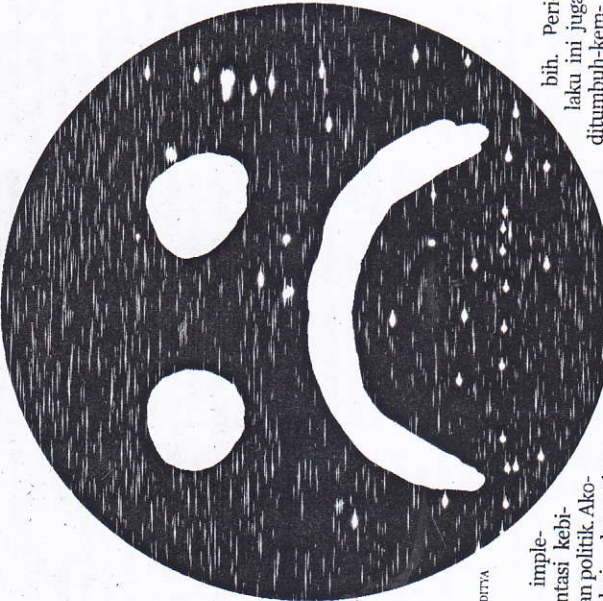
**P**raktik percaloan dibenci tetapi dirindukan. Pada musim mudik Lebaran lalu, percaloan tiket kereta api dipandang banyak permudik sangat membantu kendati ada upaya untuk memberantasnya. Ketika tiba musim membuat SIM, membayar pajak bermotor, dan pelayanan publik lainnya, percaloan pun sering gentayangan di tempat itu.

Peluang munculnya praktik seperti itu sangat terbuka lebar. Tentu saja dengan menggunakan jasa calo, waktu pengurusannya lebih cepat dan mudah kendati harus mengeluarkan dana lebih.

Barangkali benar bahwa dugaan praktik percaloan melibatkan orang dalam. Kemudian yang dimintai calo akan menjadi sulit jika dirus sendir. Kondisi ini mendorong sebagian orang untuk menyukai percaloan. Diskriminasi sepele ini tentu saja berlawanan dengan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, kondisi, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dengan kewajiban. Dampaknya, aturan yang semestinya tegak sering kali menjadi beban berat untuk diimplementasikan.

### Faktor penyebab

Ada tiga faktor yang memungkinkan percaloan tumbuh subur. Pertama, karena aturan dibuat secara elitis oleh segelintir orang untuk dilaksanakan bagi banyak orang. Orang banyak dianggap sebagai obyek yang harus taat aturan yang dibuat elite. Dalam kebijakannya Gladden (1968) menjangkankannya menjadi empat jenjang mulai dari kebijakan politik, eksekutif, hingga administratif atau operasional. Tentunya kebijakan elitis harus menjaga



ADITIA

di implementasi kebijakan politik. Akomodasi kepentingan yang ada pada tataran politik diimplementasikan oleh elite dengan pertimbangan seperti yang ada di dalam keputusan menteri tersebut.

Munculnya peraturan elitis tidak lepas dari implementasi peraturan pluralis. Sering kali juga peraturan pluralis tidak diterjemahkan ke dalam peraturan elitis yang bersifat praktis karena dalam peraturan pluralis sudah diatur rinci. Meski demikian, secara teknis administratif ada kepentingan lembaga pelayanan yang belum terakomodasi. Dampaknya sering kali dibuat peraturan yang memungkinakan masyarakat akan terbebani dalam urusan prosedur dan persyaratan lain. Beban ini membuat banyak sedur seorang diri tanpa bantuan pihak lain yang mampu memudahkannya.

Kedua, prosedur pelayanan yang tidak familiar dengan masyarakat dapat mendorong perilaku masyarakat yang berbeda dengan di atas. Tidak sedikit penerima pelayanan (konsumen) menjadi overacting ketika mampu menembus barikade prosedur dengan cara membayar le-

lebih dengan alasan belum mampu memperbaiki kesejahteraan pegawai. Barang kali kalkulasi administrasi-manajemen dalam rasionalitas pegawai dengan pekerjaan sering kali tidak maksimal. Jumlah kebutuhan pegawai untuk seluruh pelayanan publik berdampak ada atau tidak adanya rekrutmen pegawai. Kemampuan berhitung cermat terganjal oleh asumsi bahwa sektor pemerintah harus mampu membayar kesempatan kerja kepada warga negara Indonesia. Hal seperti ini memungkinkan populasi pegawai melebihi beban kerja yang harus dipikulnya. Dampaknya, praktik percaloan terbuka untuk mengupayakan kesejahteraan yang meningkat.

### Pendidikan berkesinambungan

Pendidikan tentunya membangun kebiasaan mandiri dan berguna bagi orang lain tampaknya kurang ditunjukkan. Anak sekolah didorong untuk les privat dan mengikuti bimbingan tes agar membantu guru dalam kekurangan waktunya memberikan pelajaran. Lebih jauh lagi, dapat memberikan tambahan pemuatan bagi guru les. Bagi orang tua, kemampuan mendidai anak untuk mengikuti les lebih berarti prestisius. Semakin banyak les semakin prestisius. Dengan demikian, les sering kali dipupuk untuk bertahan dan membuat anak tergantung. Bahkan, konon ada soal ulangan sekolah yang keluar dari hasil latihan dalam les.

Memangkas praktik percaloan tampaknya perlu diawali dengan pembenahan pendidikan secara berkesinambungan. Bisa saja calo akan berubah menjadi manipulator, koruptor, bahkan preman bila terus dibiarkan. Bisa saja kita sedang memupuk koruptor, etika filosofi pendidikan tidak diluruskan. Peraturan lebih dipandang sebagai pajangan indah yang bisa ditafsirkan beragam. Praktik percaloan dapat menjadi indikator suburnya budaya manja dan terima beres yang dipupuk sejak anak sekolah. Berkesinambungan perilaku ini boleh jadi hasil

pendidikan yang berorientasi pada prestise ketimbang prestasi.

Sosialisasi dan pemangkasan birokrasi adalah tahap berikutnya untuk mendorong orang mau dan mampu mengurus urusannya dengan lembaga publik. Memudahkan yang sulit sepatutnya terus ditanamkan pada diri aparat publik dan pengambil keputusan publik. Mempersulit dengan prosedur yang panjang sangat boleh jadi menyuburkan praktik percaloan. Semakin lama praktik ini dijalankan akan menjadi kanker yang sulit dicabut, kecuali dengan risiko kematian.

Rangsa ini adalah bangsa pejuang yang harus menurunkan kepedungannya kepada anak-cucu, bukan menajakkannya atau bahkan mempersulit anak-cucunya untuk berani melakukan perubahan dan memperbaiki. Dan, tugas pemerintah untuk memediasi dengan peraturan dan implementasinya yang mendorong orang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara egaliter, cepat, ringkas, dan menyeringkan.

Mengubah kebiasaan perlu diusahakan. Pendidikan merupakan momentum terbaik untuk mengubah perilaku. Buruh kebersamaan dan perjuangan untuk mewujudkan. Praktik percaloan mungkin tidak pernah bergeming tanpa ada kemauan dalam mengubah perilaku yang membuatnya tergantung pada orang lain.

Merogus kepentingan diri tentu bertentangan dengan prestise dan status sosial. Telah mulai ada yang melaksanakannya sehingga praktik percaloan berkurang secara alami. Tanpa transparansi pelayanan, praktik percaloan akan tetap dibenahi, tetapi juga dirindukan masyarakat. Bagi pelakunya, praktik itu pun sebagai upaya mencari nafkah atau menambah penghasilan yang gajinya belum mencukupi kebutuhan keluarga dalam sebulan.

ASEP SUMARYANA  
Sekretaris LP3AN Unpad dan  
Lektor Kepala pada  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Negara FISIP Unpad

11/27

11/15